



Tes Antigen Diburu, Fasilitas Kurang

- ▶ Tempat wisata, hotel, dan rumah penerima pelaku perjalanan, diharapkan dapat memastikan tamunya sehat.
- ▶ Satpol PP Kota Jogja akan memeriksa kelengkapan surat *rapid test* antigen wisatawan di sejumlah lokasi.

RISIKO MOBILITAS SAAT LIBURAN

Pemerintah mensyaratkan *rapid test* antigen bagi pelaku perjalanan khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Meski sudah ada aturan ketat, tetap tersimpan risiko terpapar Covid-19 selama perjalanan bagi para pelancong. Berikut tingkatan risiko:



JOGJA—Aturan pemerintah yang mewajibkan surat *rapid test* antigen bagi pelaku perjalanan membuat surat keterangan tersebut jadi buruan masyarakat. Sayangnya, penyedia layanan tes itu belum mampu memfasilitasi pemohon yang membeludak.

Luqas Suberkah, Sirojul Khafid, & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

Sementara, ia harus berangkat sehari setelahnya. Sama seperti Intibios, lab milik Kimia Farma juga penuh.

Hal yang sama juga dialami Ali Efendi. Sebagai seorang pemandu wisata, ia merasa wajib tes cepat antigen. Hal tersebut, katanya merupakan komitmen terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di sektor wisata. "Yang namanya kesehatan itu buat semuanya. Baik buat wisatawan, saya, dan keluarga saya. Tes ini gunanya memastikan orang yang menjamu wisatawan itu dalam kondisi sehat," ujarnya.

Saat ditemui, ia mengaku belum mendapatkan surat keterangan hasil tes cepat antigen. Padahal, ia segera membutuhkannya agar bisa dipakai untuk bekerja. Ia sudah mengunjungi beberapa lokasi penyedia tes. Tapi, tak ada yang cukup longgar. Hampir semua yang ia datangi penuh.

Tingginya animo permohonan surat keterangan hasil tes antigen dapat dikatakan bentuk inisiatif yang positif. Hanya saja kondisi itu tak sebanding dengan jumlah fasilitas tes maupun lab yang tersedia.

Sejumlah fasilitas kesehatan di DIY mulai menyediakan pelayanan tes cepat antigen. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. Sardjito, contohnya, yang akan membuka layanan tes cepat antigen mulai Selasa (22/12) hari ini.

"Rencananya demikian. Kami sudah siapkan," kata Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas RSUP Prof. Dr. Sardjito, Banu Hermawan.

Layanan itu, kata Banu sudah diburu masyarakat sejak Jumat, (18/12). Hingga Senin kemarin, sudah ada 70 orang yang dipastikan ikut tes.

Pemerintah Pusat mewajibkan pelaku perjalanan di Pulau Jawa dan Bali mengantongi surat *rapid test* antigen untuk mencegah persebaran Covid-19.

▶ Halaman 10

Tes Antigen... Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menuliskan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Penanganan dan Investigasi pada 16 Desember lalu, pengecekan surat antigen wajib dilakukan di bandara dan stasiun kereta. Di dalam kontroversi yang diwajihkan screening perjalanan udara di bandara melalui maskapai dan kereta. Tempat-tempat wisata, hotel, rumah tangga (penerimaan pelaku perjalanan), sebagainya lakukan screening kepada tamu-tamunya, supaya kita bisa pastikan tamu datang dalam keadaan sehat," katanya. Tempat wisata, hotel, dan rumah penerima pelaku perjalanan, diharapkan dapat memastikan tamunya sehat terutama pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi darat nonkereta api, agar tetap terpantau. Intinya semua (pelaku perjalanan) wajib sehat. Kalau tidak sehat ya jangan ke mana-mana. Walaupun bentuk yang wajib tes antigen hanya pesawat dan kereta, saat berkunjung ke destinasi wisata, penyelenggara wajib cek," ujarnya. Ia juga minta pengelola dan pelaku usaha tempat wisata agar benar-benar melaksanakan protokol kesehatan, karena jika tidak akan ditutup seperti yang terjadi pada salah satu tempat hiburan di Jalan Urip Sumoharjo. Bandara, stasiun kereta api, dan tempat parkir kedatangan wisata, akan menjadi sasaran operasi razia untuk mengecek syarat <i>rapid test</i> antigen bagi pelaku perjalanan. Sasar Taman Parkir "Destinasi wisata, tempat hiburan, mall, [jika] tidak patuh protokol (akan) kami tutup," katanya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja, Agus Winarto, mengatakan jawatannya akan memeriksa kelengkapan surat <i>rapid test</i> antigen wisatawan di sejumlah lokasi. Taman parkir menjadi lokasi yang bakal disisir, kalau-kalau ada wisatawan tanpa membawa persyaratan tersebut. Secara teknis, pimpinan rombongan akan diminta surat sejak rombongan tiba saat sampai di taman parkir. "Kami sasaran kami di tempat taman parkir, di tempat-tempat parkir wisata, rombongan ada penanggungjawabnya, pimpinan rombongan. Mereka yang kami minta dokumennya," katanya. Jika pimpinan rombongan tak bisa menunjukkan surat hasil <i>rapid test</i> antigen, kata Agus, dengan terpaksa rombongan tersebut tak boleh masuk ke destinasi. "Ya nanti pasti enggak boleh masuk. Pkwn ini akan mulai diterapkan, kami sedang siapkan semuanya," ujarnya. Kepala Satuan Pelayanan Terminal Grogongan Jogja, Bekti Zunanta mengatakan dalam surat edaran Pemerintah Pusat, tertera kata kaku dihapus, sehingga tes antigen bukan sesuatu yang diwajibkan, bukan kewajiban," ujarnya. Wakil Wali Kota Jogja, Herre Puerwadi, berharap wisatawan tes kesehatan. "Harapan kami tidak [berbatasan], karena saya yakin mereka yang ingin libur ke mana pun, ingin aman dan nyaman," katanya.	Herre menambahkan pernyataan itu justru mematkan wisatawan, dapat perlindungan kesehatan. "Artinya ketika ada persyaratan, pernyataan tambahan itu sebenarnya perlindungan bagi wisatawan agar ketika sampai di Jogja akan merasa aman berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Jogja," kata Herre. Diambil Sampling Sesuai surat Sekda Bantul, Helmi Jamhari mengatakan teknis pemeriksaan di wilayah Bantul akan dilakukan secara <i>sampling</i>. "Seuai edaran Gugus Tugas Pusat bahwa untuk <i>monitoring</i> dilakukan secara <i>sampling</i> terhadap pelaku perjalanan sehingga nanti Dinas Perhubungan dan jajaran Forkompida saat beroperasi bisa ditanyakan (prosedur pelaku perjalanan)," kata Sekda. Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Sahuta mengatakan sesuai arahan dari Sekda, proses pengawasan wisatawan dan pelaku perjalanan dari luar daerah akan dilakukan seperti operasi patuh protokol kesehatan yang sudah dilakukan selama pandemi Covid-19. Dalam operasi patuh protokol kesehatan tersebut akan diutamakan hasil <i>rapid test</i> antigen. "Kalau memang faktanya dalam operasi patuh ketiduran ada pelaku perjalanan dari luar kota dan tidak dilengkapi syarat, kami minta putar balik," kata Yulius. Model pemeriksaan <i>sampling</i> ini mengikuti sejumlah daerah yang juga melakukan hal sama. Terlebih posisi Bantul berada di tengah sehingga dimungkinkan sudah ada pemeriksaan di Bantul maupun wilayah timur Bantul. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengaku belum berani mengambil langkah pengujian tamu jika tidak membawa surat <i>rapid test</i> antigen. Namun bila ada arahan resmi dari Pemda DIY untuk melakukan langkah itu, pihaknya bersedia mengikuti. "Selama PHRI ada surat dari Sekda, kami akan melaksanakan. Belum kami terima apa pun surat edaran dan lain-lain," katanya. Pemkab Sleman tak berencana mengecek surat <i>rapid test</i> antigen terhadap pelaku perjalanan. "Belum ada perintah cek (tes) antigen bagi pelaku perjalanan yang masuk Sleman. Belum ada yang khusus," kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sleman, Shavir Nurmalia Dewi. Begitu pula pemeriksaan di titik perbatasan yang menjadi jalur keluar-masuk pelaku perjalanan menuju DIY. "Tidak ada rencana pemeriksaan di perbatasan," ujar Kepala Dinas Kabupaten Sleman, Joko Hartaryo. Pada hari, Kabupaten Sleman menjadi salah satu pintu keluar-masuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat menuju DIY. Sebagian besar kendaraan roda empat maupun roda dua ke DIY masuk melalui Jalan Magelang. Dibutuhkan terpacu, Kapolda DIY Tien Pti Asep Subandrar mengatakan pemeriksaan surat keterangan <i>rapid test</i> antigen akan dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. "Jadi, di Jogja pengecekan mungkin akan dilakukan di hotel	saja. Bagi (pelaku perjalanan) yang tinggal di hotel harus menunjukkan surat keterangan hasil tes cepat antigen," katanya. Calo Tes Antigen Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 6 bakal mengambil langkah tegas jika terdapat calo <i>rapid test</i> antigen yang terpasang di stasiun di bawah naungan Daop 6. Manajer Humas KAI Daop 6, Supriyanto mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo dalam <i>rapid test</i> antigen yang sekarang menjadi syarat untuk bisa naik kereta api (KA), khususnya KA jarak jauh. Berdasarkan pantauan <i>Harian Jogja</i> pada Senin di dua stasiun yakni Lempuyangan dan Tugu, tidak ada calo. <i>Harian Jogja</i> berupaya masuk ke dua stasiun tersebut dan tidak ada orang yang berupaya menawarkan jasa <i>rapid test</i> antigen. Oleh karena itu, Supriyanto menekankan agar masyarakat mengikuti prosedur <i>rapid test</i> antigen tanpa melalui perantara calo. Ketika disinggung mengenai antisipasi kerumunan antrean calon penumpang yang bakal <i>rapid test</i> antigen, KAI Daop 6 <i>Jogja</i> bakal menyediakan bilik uji <i>rapid test</i> antigen tambahan. Penambahan Kasus Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 186 penambahan kasus positif pada Senin, berdasarkan pemeriksaan pada 1.246 sampel dari 1.051 orang. Sedangkan sebanyak 175 kasus dinyatakan sembuh, dan tujuh kasus dilaporkan meninggal dunia. Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (70 kasus), Bantul (66 kasus), Kulonprogo (tiga kasus), Gunungkidul (satu kasus), dan Sleman (46 kasus). Dilhat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari <i>tracing</i> kasus positif 109 kasus, portika mandiri (21 kasus), perjalanan luar daerah (satu kasus), <i>screening</i> karawana (tiga kasus), dan belum ada keterangan (52 kasus). Tujuh kasus dilaporkan meninggal meliputi Kasus 8.295, laki-laki, 89, warga Kota Jogja; Kasus 9.173, laki-laki, 74, warga Sleman; Kasus 9.309, laki-laki, 65, warga Bantul; Kasus 9.361, laki-laki, 52; Kasus 9.373, laki-laki, 51; Kasus 9.391, laki-laki, 56; Kasus 9.440, perempuan, 74, kesemuanya warga Sleman. Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (40 kasus), Bantul (18 kasus), Kulonprogo (enam kasus), Gunungkidul (satu kasus), dan Sleman (91 kasus). Dengan perombahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 9.683 kasus, dengan rincian 2.929 kasus aktif, 6.557 kasus sembuh dan 197 kasus meninggal. Sementara penggunaan bed di rumah sakit rujukan untuk kumulatif sebanyak 43 bed, sisa 21 bed. Untuk nonkumulatif digunakan 491 bed, sisa 81 bed. Sampai saat ini, Pemda DIY total telah memeriksa 139.663 sampel dari 119.342 orang, <i>atau total sampel 4.969.766 orang, 87%</i>
---	---	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono. S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005